

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

SASARAN/INDIKATOR	TARGET	BIAYA
Sasaran 1 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok		
1. Jumlah Badan Adhok yang Dipersiapkan dan Dibentuk	28 Kecamatan	440.040.000,-
Sasaran 2 : Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik		
1. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik	1 Dokumen	78.311.000,-
Sasaran 3 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum		
1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	300.000,-
2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	300.000,-
Sasaran 4 : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum		
1. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90 %	12.000.000,-
2. Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi	85 %	12.089.000,-
Sasaran 5 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian		
1. Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %	300.000,-
Sasaran 6 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal		
1. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk tehnis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	110.000.000,-
2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100 %	300.000.000,-
Sasaran 7 : Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan		
1. Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80 %	15.000.000,-
Sasaran 8 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu		
1. Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	90 %	200.000.000,-
Sasaran 9 : Tersedianya Pedoman atau Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan		
1. Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk tehnis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	100 %	200.000,
2. Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	100 %	200.000,-
Sasaran 10 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, serta Penerapan e-government KPU		
1. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	33.955.500,-
2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100 %	200.000,-
3. Persentase Aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegarsi	65 %	33.955.500,-

Sasaran 11 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten / Kota		
1. Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85 %	2.000.000,-
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat		
1. Pertsentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	2.500.000,-
2. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal dan nasional	100 %	3.000.000,-
3. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di Media publikasi paling lambat 1 (satu) kerja	100 %	2.500.000,
Sasaran 13 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan		
1. Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	24.000.000,-
Sasaran 14 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien		
1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90 %	2.000.000,-
2. Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %	1.000.000,-
Sasaran 15 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten / Kota		
1. Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	85 %	500.000,-
2. Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	90 %	500.000,-
Sasaran 16 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran		
1. Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %	633.000,-
Sasaran 17 : Terlaksanya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan		
1. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	44.480.000,-
2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	1.527.293.000,-
3. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100 %	223.045.000,-
4. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	13.221.000,-
Sasaran 18 : Ketersediaan logistik Pemilu		
1. Persentase penyediaan logistik Pemilu		26.545.000,-
Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol		
1. Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %	1.200.000,-
Sasaran 20 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip		
1. Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	100 %	500.000,-
2. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %	500.000,-


Sasaran 21 : Terselasaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan		
1. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	85 %	712.900.000,-
Sasaran 22 : Terselasaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan		
1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	148.841.000,-
2. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Konawe yang berfungsi dengan baik	100 %	148.841.000,-

Program

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Pemilu
- 2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 3.112.268.000,-
Rp. 1.010.582.000,-

Unaha, 22 Januari 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KONAWE,

NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si
NIP.197907042009012002

